

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Sindo

Penyaluran Bansos DKI Diperpanjang hingga Desember

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperpanjang penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak Covid-19 hingga Desember 2020. Keputusan tersebut mengikuti arahan Kementerian Sosial (Kemensos). "Secara teknis, kami akan komunikasikan dengan Kemensos, agar betul-betul DKI dengan Kemensos sejalan," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah kemarin.

Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran dana untuk penyaluran bansos tahap III sebesar Rp5,3 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari Belanja Tak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang disisihkan untuk seluruh penyaluran bansos dan penanganan wabah Covid-19.

Irmansyah menuturkan, penyaluran bansos tahap III menyoal 2,4 juta kepala keluarga (KK). Sebanyak 1,3 juta KK bakal menerima bansos dari pemerintah pusat dan 1,1 juta KK dari Pemprov DKI. "Tapi ini dikordinasikan dengan teman-teman di wilayah melalui lurah

dan RW/RT. Mereka bisa lebih objektif datanya. Kalau tidak, kita selalu menemukan data tidak pas," ucap Irmansyah.

Pemprov DKI Jakarta bersama Kemensos juga masih membahas nilai dan isi paket bansos tersebut. Pemprov DKI, kata dia, akan mengikuti arahan pemerintah pusat. "DKI mencaup untuk Jakarta Timur dan Pulau Seribu. Empat wilayah kota ditanggung di Kemensos. Berarti (isi dan nilai paket) harus sama *dong*, jangan sampai tetangga beda," ujarnya.

Sementara itu, Pemprov masih mendata warga penerima bansos di 66 RW yang masuk dalam zona merah Covid-19. Menurut Irmansyah, data penerima bansos di 66 RW itu tengah dikerjakan pihak kelurahan. Nantinya data itu menjadi rujukan Dinsos untuk menyalurkan bansos berupa sembako.

"Kami menunggu datanya dari RW, juga dari lurahnya, sampai kepada kami. Nanti kami akan *support* juga kebutuhan logistik atau sembako yang ada disana," ungkapnya.

Irmansyah menjelaskan, dalam instruksi Gubernur DKI Ja-

karta Anies Baswedan, mereka yang berada di 66 RW itu harus diberi dukungan dari pemerintah. Namun, untuk memberikan bansos, pihaknya memerlukan data yang akurat agar tepat sasaran.

Pendataan warga 66 RW itu sedikit tersendat lantaran bersamaan dengan proses *rapid test*. Dia berharap agar pendataan segera selesai dan bansos segera didistribusikan. "Ketika mereka masuk dalam zona merah yang perlu dikendalikan, tentunya kita harus *support*. Pak Gubernur kan bilang seperti itu. Tapi kita menunggudatanya dulu, jangan sampai datanya tidak tepat sasaran," pungkasnya.

Sebelumnya dalam evaluasi bansos DKI tahap I, pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta sempat saling serang. Menteri Sosial Juliari P Batubara menuuding realisasi bansos dari Pemprov DKI Jakarta tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pun sempat menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait konsekuensi data yang serupa pada bansos tahap I.

□ **bimasetiyadi**